



**JEMSI:**  
**Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem**  
**Informasi**

https://dinastirev.org/JEMSI    ✉ [dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)    ☎ +62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jemsi.v6i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

E-ISSN: 2686-5238  
P-ISSN: 2686-4916

## Pendekatan *Whole of Government* (WOG) Dalam Stimulasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara

Sulistio Diliwanto Binsasi<sup>1</sup>, Kanisius Kono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Timor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, [anto01binsasi@gmail.com](mailto:anto01binsasi@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Timor, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, [kanisiuskono@gmail.com](mailto:kanisiuskono@gmail.com)

Corresponding Author: [anto01binsasi@gmail.com](mailto:anto01binsasi@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *The Whole of Government (WOG) approach is a strategy that emphasizes coordination and collaboration among government agencies to address issues comprehensively. In tackling stunting in North Central Timor Regency (TTU), this approach aims to ensure that various government sectors work synergistically. This study aims to analyze the Whole of Government approach and the supporting and inhibiting factors in the implementation of the Stunting Mitigation policy in TTU Regency. The implementation of WOG involves concrete steps such as inter-agency coordination, integrated planning, human resource capacity building, community participation, integrated programs, and monitoring and evaluation. However, challenges include inadequate planning quality, low community participation, and limited human resources. Supporting factors such as strong political commitment and the availability of accurate data, as well as social and cultural barriers, affect the success of this approach. The synergy between stakeholders and an adaptive approach to challenges are key to successfully optimizing the stunting mitigation policy in TTU Regency.*

**Keyword:** *Whole of Government, Policy, Stunting.*

**Abstrak:** Pendekatan *Whole of Government* (WOG) adalah strategi yang mengedepankan koordinasi dan kolaborasi antar lembaga pemerintah untuk menangani masalah secara menyeluruh. Dalam penanggulangan stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), pendekatan ini bertujuan agar berbagai sektor pemerintah bekerja secara sinergis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendekatan *Whole Of Government* dan Faktor Pendukung dan Penghambat dalam stimulasi pelaksanaan kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten TTU. Penerapan WOG melibatkan langkah konkret seperti koordinasi antar instansi, perencanaan terpadu, penguatan kapasitas SDM, partisipasi masyarakat, program terintegrasi, dan pemantauan evaluasi. Namun, tantangan yang dihadapi antara lain kualitas perencanaan yang kurang memadai, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan SDM. Faktor pendukung seperti komitmen politik yang kuat dan ketersediaan data yang akurat, serta hambatan sosial dan budaya, memengaruhi keberhasilan penerapan pendekatan ini. Sinergi antara pemangku kepentingan dan pendekatan yang adaptif terhadap tantangan menjadi

kunci keberhasilan dalam mengoptimalkan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten TTU.

**Kata Kunci:** Seluruh Pemerintahan, Kebijakan, Stunting

---

## PENDAHULUAN

Birokrasi publik saat ini menghadapi tantangan signifikan, di mana masyarakat semakin menuntut kebijakan publik yang berkualitas, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Hal ini mengindikasikan pergeseran paradigma, di mana kebijakan publik tidak lagi dipandang sebagai alat untuk meraih kekuasaan semata, tetapi sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif. Peningkatan rasionalitas ini memungkinkan masyarakat untuk lebih kritis dalam menilai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Seiring dengan itu, rendahnya kualitas kebijakan di Indonesia dapat dilihat melalui sejumlah indeks yang diterbitkan oleh berbagai institusi, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi adalah minimnya dokumentasi praktik kebijakan yang dilakukan oleh sejumlah instansi pemerintah, yang mengakibatkan tidak adanya pembagian pengalaman yang dapat diakses oleh banyak pihak untuk diadaptasi dan diterapkan dalam proses kebijakan. Selain itu, sampai saat ini belum ada forum dinamis yang dapat mengakomodasi kegiatan kolaboratif antar analis kebijakan lintas institusi yang penting untuk memperkuat profesionalisme dan kemampuan dalam melakukan analisis kebijakan secara deliberatif.

Fenomena dalam proses kebijakan tersebut juga tercermin dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara. Stunting merupakan masalah krusial di Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Kabupaten TTU telah melakukan upaya penanggulangan melalui Aksi GEMAS (intervensi jangka pendek), 8 Aksi Konvergensi (intervensi jangka panjang), serta kebijakan lainnya seperti Instruksi Bupati TTU No. DPMD 413.4/2008/VI/2019, dan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2022 tentang Peran Desa dalam Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Namun, kebijakan-kebijakan ini belum optimal dalam pelaksanaannya. Laporan Hasil Pemantauan Status Gizi (Stunting, Wasting, Underweight) yang dirilis oleh Dinas Kesehatan Kabupaten TTU setiap tahun menunjukkan bahwa selama tiga tahun terakhir, rata-rata penurunan angka stunting hanya mencapai 1,5% (Tahun 2020: 28,9%; Tahun 2021: 25,3%; Tahun 2022: 24,4%). Kondisi ini menjadikan Kabupaten TTU sebagai salah satu kabupaten dengan angka stunting tertinggi di Provinsi NTT, yang juga merupakan provinsi dengan angka stunting tertinggi di Indonesia. Sementara itu, sesuai dengan RPJMD, target ambang maksimal stunting di Kabupaten TTU harus mencapai 18% pada tahun 2023 dan 11% pada tahun 2024 (Dinkes TTU, 2023).

Ketidakefektifan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara disebabkan oleh belum tercapainya kerja kolaboratif lintas sektor dan minimnya kontribusi antar sektor dalam penanggulangan stunting, akibat tingginya ego sektoral. Pendekatan *Whole of Government* (WoG) adalah pendekatan yang menjelaskan bagaimana sistem dapat membangun kolaborasi sumber daya dan pengetahuan dengan menghubungkan berbagai pihak yang berkepentingan melalui metode koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi untuk meningkatkan kualitas kebijakan. Pendekatan *Whole of Government* juga dikenal sebagai pendekatan antarinstansi yang melibatkan berbagai kelembagaan terkait dengan urusan-urusan relevan, serta menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini ada (Tamtanus, 2019).

Pendekatan *Whole of Government* (WoG) diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebijakan penanganan stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara dengan mewujudkan

kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam setiap tahap proses kebijakan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalisir ego sektoral melalui terciptanya saluran komunikasi yang terbuka, akses yang transparan, serta akuntabilitas yang jelas. Dengan demikian, setiap instansi dan pemangku kepentingan dapat saling berkolaborasi dan berkontribusi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu penurunan angka stunting yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif analitis, dengan Whole of Government sebagai unit analisis. Penelitian ini berfokus pada Pendekatan Whole of Government dan berusaha membangun pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, yang diperoleh dari informan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan teori atau pola pengetahuan tertentu (Creswell, 2010), serta menggambarkan pandangan subjek terkait fenomena yang terjadi sehari-hari (Sugiyono, 2019). Untuk mendukung data lapangan, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan penelitian. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara yang bersifat umum, tidak terstruktur, dan terbuka, agar memudahkan pengumpulan data yang valid dan reliabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan Whole Of Government (WOG) Dalam Stimulasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Timor Tengah Utara

Pendekatan Whole of Government (WOG) adalah strategi yang melibatkan koordinasi dan kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan publik. Pendekatan ini menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan terintegrasi.

Dalam konteks penanggulangan stunting, pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa berbagai sektor dan instansi pemerintah bekerja bersama secara sinergis untuk mengatasi masalah stunting secara holistik di Kabupaten Timor Tengah Utara. Menurut Tamtanus (2019), pendekatan WOG merupakan solusi terhadap permasalahan klasik dalam birokrasi, seperti koordinasi dan komunikasi yang kurang efektif antar lembaga. Pendekatan ini memastikan bahwa tidak ada sektor yang terisolasi dalam upaya penanganan isu-isu besar seperti stunting. Selain itu, Ramadhan (2019) menambahkan bahwa WOG juga mencakup integrasi sumber daya dan pengetahuan untuk membangun kebijakan yang lebih berkualitas. Berikut adalah beberapa langkah konkret untuk menerapkan pendekatan Whole of Government (WOG) dalam stimulasi pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting di Kabupaten TTU.

Sebagai aktualisasi dari komitmen untuk terus menekan angka prevalensi stunting, Pemerintah Kabupaten TTU menetapkan intervensi jangka pendek, melalui Aksi GEMAS (Gerakan Menurunkan Angka Stunting) dan GERPAS (Gerakan Peduli Anak Stunting), dan intervensi jangka panjang, melalui 8 Aksi Konvergensi Stunting untuk penanggulangan yang terintegrasi (Analisis Situasi; Rencana Kerja; Rembuk Stunting; Penyusunan Regulasi; Pembinaan Kader Pembangunan Manusia [selanjutnya disingkat 'KPM']; Manajemen Data; Pengukuran dan Publikasi Data; Monitoring dan Evaluasi).

Berdasarkan hasil penelitian perlu adanya kerja kolaboratif sampai tingkat desa agar tercapainya intervensi 8 aksi konvergensi stunting diantaranya :

### **1. Koordinasi Antar Instansi: Membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor sampai Tingkat Desa.**

Membentuk tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan semua pihak terkait, dari pemerintah daerah hingga masyarakat desa, untuk memastikan kebijakan penanggulangan

stunting dilaksanakan secara terkoordinasi dan efektif. Tim koordinasi ini bertugas menyusun rencana aksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan. Setiap instansi yang terlibat memiliki peran penting dalam pelaksanaan kegiatan terkait stunting. Forum koordinasi atau Rembuk Stunting akan diadakan secara rutin untuk membahas kemajuan, tantangan, dan solusi. Forum ini tidak hanya mendiskusikan kebijakan, tetapi juga merumuskan strategi bersama untuk mengatasi hambatan yang ada. Koordinasi yang terstruktur dan sistematis ini juga memungkinkan adanya pertukaran informasi antar instansi yang memperkuat pelaksanaan program.

## **2. Perencanaan dan Strategi Terpadu: Menyusun Rencana Aksi Penanggulangan Stunting**

Merancang rencana aksi yang menyeluruh dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, termasuk pemerintah desa, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta. Pemetaan kebutuhan dan sumber daya dilakukan untuk mengetahui desa-desa mana yang paling membutuhkan intervensi. Dengan data ini, intervensi yang lebih tepat sasaran dapat dirancang. Proses perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat secara spesifik agar hasilnya relevan dan dapat diterima. Meskipun demikian, pada praktiknya masih banyak perencanaan yang belum berkualitas, dan belum sepenuhnya dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara optimal, seperti halnya kekurangan data atau pemahaman tentang kondisi lokal yang riil.

## **3. Penguatan Kapasitas dan Sumber Daya: Pelatihan dan Alokasi Anggaran**

Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penanggulangan stunting, baik itu tenaga kesehatan, pendidik, maupun kader posyandu. Program pelatihan yang berkelanjutan akan diberikan kepada tenaga kesehatan, kader pembangunan manusia, serta pendidik mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan stunting. Selain itu, penting untuk memastikan adanya alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung berbagai program terkait stunting. Masalah yang sering dihadapi di Kabupaten TTU adalah kurangnya tenaga yang terlatih, serta proses perekrutan tenaga yang tidak objektif dan kurangnya pelatihan yang memadai untuk kader di tingkat desa, yang berdampak langsung pada kualitas implementasi program.

## **4. Partisipasi Masyarakat dan Stakeholder: Melibatkan Masyarakat Lokal**

Mengajak masyarakat lokal untuk aktif berpartisipasi dalam implementasi program penanggulangan stunting agar intervensi lebih tepat sasaran. Program penanggulangan stunting harus didesain dengan melibatkan masyarakat lokal, agar intervensi yang dilakukan dapat sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, kerjasama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah harus didorong untuk memperkuat program-program yang berhubungan dengan gizi dan kesehatan. Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam rencana aksi masih belum maksimal. Kurangnya kolaborasi antara berbagai pihak, serta belum optimalnya pemanfaatan modal sosial di tingkat desa, menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan program.

## **5. Implementasi Program Terintegrasi: Mengintegrasikan Program-Program Terkait**

Menyatukan berbagai program yang berkaitan dengan gizi, edukasi pola makan sehat, dan nilai lokal untuk menciptakan pendekatan yang lebih holistik dalam penanggulangan stunting. Program-program yang berkaitan dengan gizi, pola makan sehat, dan pemberdayaan masyarakat harus diintegrasikan dalam satu sistem yang dapat mendukung penurunan angka stunting. Pendekatan ini harus melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan program, agar semua kebutuhan masyarakat dapat diakomodasi. Hal ini penting agar kebijakan yang

diterapkan bersifat deliberatif, memperhatikan kebutuhan lokal, serta bersinergi dengan nilai-nilai lokal di Kabupaten TTU.

## 6. Pemantauan dan Evaluasi: Sistem Pemantauan Bersama

Memastikan bahwa kebijakan penanggulangan stunting berjalan sesuai rencana dan memiliki dampak positif. Sistem pemantauan bersama yang melibatkan berbagai lembaga harus dibangun untuk mengumpulkan data terkait dengan pelaksanaan kebijakan. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai efektivitas program dan mengidentifikasi perubahan atau penyesuaian yang diperlukan. Pemantauan ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik dan memenuhi tujuannya, serta untuk mengatasi masalah yang mungkin timbul selama proses pelaksanaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, pendekatan *Whole of Government* (WOG) dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan penanggulangan stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara. Koordinasi yang efektif, perencanaan yang matang, penguatan kapasitas, serta partisipasi aktif dari masyarakat dan stakeholder akan mempercepat pencapaian target penurunan angka stunting di daerah tersebut.

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pendekatan *Whole Of Government* (WOG) Dalam Stimulasi Pelaksanaan Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kabupaten Timor Tengah Utara.

Pendekatan *Whole of Government* (WOG) dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan stunting melibatkan kolaborasi berbagai sektor dan lembaga pemerintah untuk menangani masalah secara menyeluruh dan terpadu. Berikut adalah faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan pendekatan ini :

1. Komitmen Politik dan Dukungan Kebijakan: Dukungan dari pimpinan politik yang tinggi, seperti Bupati, Kepala Dinas, dan Kepala Desa, dapat memperkuat komitmen terhadap penanggulangan stunting dan memastikan alokasi anggaran yang memadai
2. Kendala Sosial dan Budaya: Faktor budaya dan norma sosial yang menghambat penerimaan program atau modal sosial yang dihidupi dan diperlukan untuk menanggulangi stunting.
3. Ketersediaan Data dan Informasi: Data yang komprehensif mengenai prevalensi stunting dan faktor-faktor yang mempengaruhi sangat penting untuk merencanakan intervensi yang tepat dan mengukur dampaknya.

Mengatasi faktor-faktor penghambat dan memaksimalkan faktor pendukung adalah kunci untuk keberhasilan penerapan pendekatan *Whole of Government* dalam menanggulangi stunting. Strategi yang efektif membutuhkan sinergi dan kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan serta pendekatan yang adaptif terhadap tantangan yang ada.

## KESIMPULAN

Pendekatan *whole of government* dalam penanggulangan *stunting* di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebuah strategi yang melibatkan seluruh komponen pemangku kepentingan untuk memaksimalkan kolaborasi demi mencapai target yang diinginkan dengan lebih efisien. Namun, dalam pelaksanaannya, pendekatan ini belum sepenuhnya terwujud dalam tindakan nyata. Keterlibatan berbagai pihak, seperti masyarakat, tokoh adat, dan sektor swasta, masih perlu ditingkatkan. Konsekuensinya, pola kerja dalam kerangka *whole of government* belum berjalan optimal, terlihat dari perencanaan yang kurang berkualitas, minimnya penguatan kapasitas bagi para pelaksana terutama dalam hal pelatihan kader pembangunan manusia serta kurangnya perhatian terhadap modal sosial dan nilai-nilai lokal yang seharusnya menjadi dasar dalam mendukung intervensi penanggulangan stunting sampai tingkat desa. Untuk mengatasi stunting di Kabupaten Timor Tengah Utara, beberapa langkah strategis penting perlu dilakukan.

1. **Pertama**, keterlibatan semua pemangku kepentingan harus ditingkatkan. Pemerintah daerah perlu mendorong partisipasi masyarakat melalui forum komunitas dan kampanye

informasi. Tokoh adat juga harus dilibatkan untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Sektor swasta perlu memberikan dukungan finansial dan sumber daya.

2. **Kedua**, kualitas perencanaan program harus diperbaiki. Proses perencanaan perlu inklusif dan berdasarkan data akurat agar intervensi lebih efektif.
3. **Ketiga**, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan untuk pelaksana program sangat penting. Dukungan teknis harus diberikan secara terus-menerus agar pelaksana dapat bekerja dengan baik.
4. **Keempat**, modal sosial dan nilai-nilai lokal perlu diintegrasikan dalam setiap tahap perencanaan dan pelaksanaan program. Menghormati tradisi dan kebiasaan setempat akan membantu meningkatkan dukungan masyarakat. Terakhir
5. **Kelima**, sistem monitoring dan evaluasi yang efektif harus dibangun untuk mengidentifikasi tantangan dan mengukur capaian program. Mengumpulkan umpan balik dari pemangku kepentingan juga penting untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan di lapangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendekatan Whole of Government dapat lebih efektif dalam mempercepat penanggulangan stunting di kawasan tersebut.

Ucapan Terima Kasih Kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Timor yang telah mendanai penelitian ini.

## REFERENSI

- Barrung, P., Limbong, M., & Sunaryo, T. (2021). Pengaruh Etos Kerja dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Guru SMK Kristen Tagari. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 4417–4428. <http://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1575>
- Diavano, Adam. 2020. *Konsep Whole of Government (WoG) Sebagai Solusi Permasalahan Pencemaran Aliran Sungai Dalam Bingkai Politik Hijau (Studi Di Sungai Citarum)*. Diakses dari: <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/plpb/article/view/23205/12424>.
- Ernawati, E., Iskandar, A., & Pratidina, G. (2018). Pengaruh Kompensasi Terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai Pada Bidang Kebersihan Dan Pertamanan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(1), 61. <https://doi.org/10.30997/jsh.v9i1.1374>
- Firmansyah, A., & Pasaribu, V. L. D. (2023). Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawaipada Kantor Kecamatan Rumpin. *Jurnal Sekretari Universitas Pamulang*, 10(2), 198–211. <https://doi.org/10.32493/skr.v10i2.31494>
- Firmansyah, F., Amanah, S., & Sadono, D. (2015). Motivasi, Kepuasan Kerja dan Kinerja Penyuluh Kehutanan di Kabupaten Cianjur Jawa Barat. *Jurnal Penyuluhan*, 11(1), 11–22. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v11i1.9928>
- Fitriani, Sylvia, & Idris, M. (2024). Pengaruh kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu. *Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 5(1), 85–97. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/JMMNI/article/view/4575/2568>
- Illahi, M. J., Rahmawati, R., & Ramdani, F. T. (2024). Peran Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Kecamatan Padang Utara. *Karimah Tauhid*, 3(5), 5655–5665. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i5.13381>
- Irmawati, Iskandar, A., & Sudarsa, A. S. (2020). Strategi Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor Strategy for Improving the Public Service

- Performance of Community Satisfaction in the Pakansari Sub-District Off. *Administratie: Jurnal Administrasi Publik*, 3(2), 117–126. <https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/3111>
- NARA. 2014. *Open Government Plan*. National Archives and Records Administration, United States: National Archives.
- Lesmana, R. (2016). Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja penyuluh pertanian lapangan
- Lubis, R. K. (2019). Analisis pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja penyuluh pertanian Kabupaten Serdang Bedagai. *Agriprimatech*, 3(1), 33–40. <http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/Agriprimatech/article/view/783/564>
- Pinem, L. N., & Marnisah, L. (2024). Pengaruh Motivasi, Kompensasi dan Budaya Kerja Terhadap Kinerja Penyuluh Pertanian di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(6), 3455–3472. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i6.2574>
- Prescillia, A., Iskandar, A., & Subagdja, R. O. (2021). *Pengaruh Kepemimpinan Transformasional Dan Inovasi Terhadap Peningkatan Kepuasan Kerja Pegawai Di Kantor Kecamatan Bogor Selatan*. 4(2), 83–90. <https://ojs.unida.ac.id/AJAP/article/view/9772>
- Rahmat, C. A., & Novianto, Y. (2023). Penerapan Metode Regresi Linier Berganda Untuk Mengestimasi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Informatika Dan Rekayasa Komputer (JAKAKOM)*, 3(1), 359–369. <https://doi.org/10.33998/jakakom.2023.3.1.732>
- Rahmawati, R., & Sultoni, M. R. (2024). Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan. *Karimah Tauhid*, 3(2), 1652–1659. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i2.11887>
- Ramadhan, R. Prakoso. 2019. *Bahan Ajar Whole Of Government*. Latsar CPNS Golongan III Tahun 2019. Jawa Timur: BPSDM Provinsi Jawa Timur.
- Ramdan, D. M., Sarma, M., & Hadiano, A. (2024). Durian Agribusiness Development Strategy in Boven Digoel Regency. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, 10(10), 7705–7711. <https://doi.org/10.29303/jppipa.v10i10.9413>
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Susanto, N., Rosnita, & Sayamar, E. (2015). Analisis Pelaksanaan dan Motivasi Penyuluh Pertanian di Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir Implementation and Motivation Analyses of Agricultural Extension in Kubu District Rokan Hilir Regency. *Dinamika Pertanian*, XXX(2), 155–162. <https://journal.uir.ac.id/index.php/dinamikapertanian/article/view/809>
- Sutopo, Adi & Suryanto. 2009. *Pelayanan Prima*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Suwarno, Yogi dan Sejati, T.A. 2017. *Modul Pelatihan Dasar CPNS: Whole Of Government*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- United Nations. 2012. *United Nations E-Government Survey 2012: E-Government for the People*. United Nations, New York.
- Tamtanus, A. Sediadi. 2019. *Arsip Dinamis Dalam Rangka Whole Of Government Di Perguruan Tinggi*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Tahitu, M. (2015). Kualitas Pelayanan Penyuluhan Pertanian dan Kepuasan Petani dalam Pengembangan Usahatani (Kasus di Desa Sukadamai Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor) *Agricultural. Jurnal Penyuluhan*, 9(2), 146–155. <https://doi.org/10.25015/penyuluhan.v9i2.9903>
- Wardana, A., Ruspitasari, W., & Handoko, Y. (2023). Pengaruh Kepuasan, Motivasi Dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pmi Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Riset Aplikasi*

*Manajemen*, 1(1), 258–276. <https://doi.org/10.32815/jiram.v1i1.20>